

PENDIDIKAN KRITIS: RISALAH SINGKAT

A. Supratiknya

1. Pada mulanya, pedagogi dimaknai sebagai didaktik, yaitu kajian tentang hubungan antara murid, guru, dan mata ajar. Didaktik atau “the science of teaching” menekankan bahwa setiap mata ajar bersifat unik serta bahwa materi ajar dan proses penyajiannya adalah sama-sama penting. Dengan kata lain, pedagogi sebagai didaktik berfokus pada proses murid belajar serta materi yang harus dipelajari (Murphy, 1996).
2. Bertolak dari konsep di atas, khususnya di Inggris sejak akhir abad ke-19 berlangsung rangkaian perubahan tentang makna dan praktek pedagogi sebagai didaktik mengikuti perubahan pandangan orang tentang hubungan antara konsepsi tentang (kemampuan) murid, proses belajar, dan proses pendidikan.
 - a. Akhir abad ke-19, teori psikologi asosiasi tentang belajar memandang bahwa murid merupakan sekadar penanggap pasif (*passive responders*) terhadap stimuli eksternal. Belajar di sekolah diwajibkan di jenjang pendidikan dasar pada 1890-an dan di jenjang pendidikan menengah pada awal 1900-an dengan tujuan untuk menanamkan aneka keutamaan (*good habits*) dan mengatasi akibat dari kebiasaan hidup yang buruk, khususnya berupa kejahatan dan kemiskinan.
 - b. Salah satu akibat ditemukannya statistik adalah munculnya konsep “kelas”. Konsep kelas ini selanjutnya menimbulkan perubahan dalam tata kelola aparatus pendidikan, meliputi yang penting: perubahan dari penyediaan ruang-ruang sekolah menjadi ruang-ruang kelas, perubahan dari pengelompokan murid dari berbagai usia (*mixed age groupings*) menjadi pengelompokan murid ke dalam “kelas-kelas” sama usia.
 - c. Berkembangnya psikometri mengakibatkan praktek pendidikan didasarkan pada konsep-konsep psikometrik, salah satu di antaranya adalah konsep “normal”. Alam diyakini membekali manusia dengan abilitas atau kemampuan bawaan yang terdistribusikan secara normal dalam keseluruhan populasi umat manusia. Kemampuan bawaan setiap murid menjadi batas dari apa yang bisa dicapainya. Pengajaran tidak bisa mengubah potensi murid untuk belajar.
 - d. Pandangan yang pesimistik di atas kemudian digantikan oleh pandangan optimistik yang meyakini bahwa manusia dibekali dengan kapasitas untuk belajar. Setiap anak diyakini memiliki serangkaian kualitas dan abilitas yang bisa direalisasikan asalkan tersedia lingkungan yang sesuai. Pedagogi berbasis kelas harus digeser menjadi pedagogi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing murid, pedagogi yang berpusat pada murid (*child-centered theories of learning*). Peran guru bukan lagi sebagai penanam kemampuan rasional dalam diri murid, melainkan sebagai “pendamping” murid untuk tumbuh sesuai dengan tahap perkembangan dan “kesiapan”-nya untuk belajar. Murid mampu belajar dari pengalamannya hanya jika dia sudah mencapai “kesiapan” sesuai tahap perkembangannya (Jean Piaget).
 - e. Pandangan optimistik di atas makin diperkuat oleh teori-teori konstruktivis sosio-kultural tentang belajar yang memandang bahwa murid merupakan agen yang aktif mengonstruksi makna dan pengetahuan. Murid mengonstruksi pengetahuan baru dengan menggunakan pengetahuan operatif yang dimilikinya, yaitu pemahaman murid tentang pengetahuan yang dia miliki dan cara dia memperoleh pengetahuan itu. Pengetahuan operatif atau metakognisi ini bisa diajarkan oleh guru dengan mengandalkan bahasa. Dengan kata lain, penguasaan bahasa merupakan salah satu kunci dalam proses belajar dan perkembangan murid. Bahasa memediasikan tindakan-

tindakan murid, membentuk proses-proses mental khas manusia dalam diri murid sekaligus merupakan produk dari pengalaman sosial murid. Potensi murid untuk belajar ditentukan oleh pengetahuan yang sudah dia miliki dan kapasitasnya untuk belajar. Potensinya untuk mencapai prestasi yang tinggi dalam belajar bisa direalisasikan berkat bantuan orang dewasa atau teman yang memiliki pengetahuan lebih. Tugas orang dewasa atau guru adalah menyediakan *scaffolding*, yaitu secara aktif menyediakan fasilitasi yang diperlukan oleh murid dalam belajar sampai murid mencapai kompetensi untuk mandiri (Lev Vygotsky).

- f. Agar mampu memfasilitasi murid belajar di sekolah secara optimal, guru perlu menguasai dasar pengetahuan sekaligus dasar pedagogis dari mata ajar yang diajarkannya. Dengan kata lain, guru harus menguasai *pedagogical content knowledge* dari setiap mata ajar yang diajarkannya, yaitu “that special amalgam of content and pedagogy that is uniquely the province of professional understanding” (Shulman, 1987, dalam Murphy). Artinya, gabungan spesial antara materi dan pedagogi yang merupakan ciri pemahaman profesional seorang guru atas tugasnya sebagai pengajar sebuah mata ajar. Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa pengetahuan tentang setiap mata ajar (*subject knowledge*) bersifat mutlak, tak terbantahkan, berdimensi tunggal, dan statis (Meredith, 1995, dalam Murphy).

Jejak semua pandangan di atas masih dapat kita temukan dalam praktek pendidikan sekolah di masa kini termasuk di Tanah Air, mulai jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan tinggi termasuk pendidikan tinggi calon guru.

3. **Pedagogi kritis.** Sementara itu pada 1970-an muncul pandangan baru tentang pedagogi yang tidak lagi sekadar melihatnya sebagai didaktik atau ilmu tentang mengajar, melainkan sebagai “*a site of discourse*” atau “tempat pertarungan wacana” melalui interaksi antara guru, murid, serta lingkungan belajar dan tugas belajar (Murphy, 1996). Pedagogi baru ini lazim dikenal sebagai *pedagogi kritis*. Pendidikan kritis adalah sebuah cara memaknai, menegosiasikan, dan mentransformasikan hubungan di antara pengajaran di sekolah, produksi pengetahuan, struktur kelembagaan sekolah, serta hubungan sosial dan material dari komunitas dan masyarakat yang lebih luas (Breunig, 2005).
4. **Sekolah sebagai agen normalisasi.** Menggali inspirasi dari teori sosial kritis dan kajian budaya, pedagogi kritis atau pendidikan kritis berpandangan bahwa secara historis sekolah telah menjadi bagian dari tatanan sosial dan politik dalam sebuah masyarakat dan mewakili kepentingan kelompok masyarakat yang dominan. Alih-alih berperan sebagai tempat penting berlangsungnya mobilitas sosial dan ekonomis bagi para murid, sekolah telah berubah menjadi proses kultural dan historis tempat murid-murid ditempatkan dalam serangkaian hubungan kekuasaan yang asimetris mengikuti pengelompokan yang tidak adil berdasarkan ras, kelas, atau gender. Pedagogi kritis bertugas mengungkapkan dan mengkritisi bahkan menghapuskan peran reproduktif sekolah dalam kehidupan politik dan kultural masyarakat yang tidak adil itu. Pendidikan kritis memberikan sarana kepada baik guru maupun murid untuk lebih memahami peran reproduktif sekolah di tengah masyarakat yang mengalami ketimpangan berdasarkan pembagian ras, kelompok sosial, maupun gender. Sarana tersebut berupa: cara mempersoalkan pengalaman murid, teks-teks, ideologi guru, dan berbagai aspek kebijakan sekolah; cara mengintegrasikan berbagai teori ke dalam praktek pendidikan; serta cara mengkritisi cara kerja sekolah sebagai lembaga normalisasi (*normalizing agency*) yang pada dasarnya memberikan legitimasi terhadap hubungan dan praktek sosial yang ada serta menjadikan hubungan dan praktek sosial yang sesungguhnya bermasalah itu terkesan normal dan alamiah dengan cara merekayasa berbagai aturan dan kode yang membentuk realitas di ruang kelas (McLaren, 1994). Menurut pendidikan kritis, dalam wilayah apa saja dan dengan

mekanisme seperti apa sekolah menjalankan peran normalisasinya terhadap ideologi yang dominan?

- a. *Tujuan dan struktur sekolah.* Sekolah memberikan kepada murid lebih dari sekadar pengajaran. Sekolah juga memberikan berbagai norma dan prinsip bertingkah laku melalui berbagai pengalaman murid di sekolah dan di tengah masyarakat luas. Norma-norma dan prinsip-prinsip-prinsip ini paling sering diturunkan atau bersumber dari ideologi milik ras, gender, agama, dan kebudayaan yang dominan dalam kelas sosial atau kelompok masyarakat yang menguasai kekayaan material dan simbolik dari masyarakat. Sekolah bertindak melestarikan cara membentuk pengetahuan (*ways of knowing*) yang dominan ini (Giroux, 1997; McLaren, 2003; dalam Breunig, 2005).
 - b. *Kurikulum.* Baik isi maupun bentuk kurikulum pada dasarnya bersifat ideologis. Gagasan-gagasan dan materi persekolahan paling sering merupakan cita-cita dan kebudayaan dari kelas yang dominan. Maka, jenis pengetahuan dan praktik di ruang kelas juga mengafirmasikan nilai-nilai, kepentingan-kepentingan, dan keprihatinan-keprihatinan dari kelas sosial atau kelompok masyarakat yang menguasai kekayaan material dan simbolik dari masyarakat. Inilah yang oleh Eisner (2002, dalam Breunig, 2005) disebut “kurikulum tersembunyi” (*hidden curriculum*) yaitu pesan-pesan yang ditanamkan kepada murid tidak hanya melalui berbagai struktur sekolah melainkan juga melalui buku-buku teks, guru-guru, dan aneka sumber lain baik yang ada di sekolah maupun di tengah masyarakat luas.
 - c. *Metodologi mengajar.* Hegemoni kelompok dominan melalui sekolah juga terwujud lewat metodologi mengajar yang diterapkan oleh guru dan yang paling sering didasarkan pada pandangan bahwa tujuan utama sekolah adalah mentransmisikan pengetahuan yang diperlukan bagi murid untuk memasuki dunia kerja. Pengajaran yang baik adalah yang mampu mentransmisikan jenis pengetahuan seperti dimaksud dengan cara yang paling efisien, melalui apa yang oleh Freire disebut “banking model of education”. Dalam model pengajaran ini murid sekadar diperlakukan sebagai bejana yang siap diisi dengan semua jenis pengetahuan yang dipilih oleh guru untuk dimasukkan ke dalamnya, seraya mengabaikan bahkan membungkam suara dan pengalaman pribadi murid (Breunig, 2005). Dalam model pengajaran ala transaksi perbankan ini, pengetahuan diperlakukan sebagai sesuatu yang bersifat statis, ditentukan sebelumnya, dan milik sebuah otoritas (guru) yang memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk menyebarkanluaskannya kepada orang lain khususnya murid (Vassallo, 2012).
5. **Neoliberalisme.** Salah satu ideologi dominan yang menguasai praktek kehidupan pada umumnya maupun praktek penyelenggaraan pendidikan sekolah pada khususnya pada zaman ini adalah *neoliberalisme*. Neoliberalisme merupakan logika ekonomi yang ditopang oleh gagasan bahwa jalan terbaik untuk menciptakan kemakmuran dan kesempatan yang adil adalah mentransformasikan semua tata laksana ekonomi dan sosial agar berjalan mengikuti logika pasar bebas. Maka mengikuti etika efisiensi dan produktivitas, sekolah berusaha mengoptimalkan pilihan bagi murid, mendukung kompetisi, dan menanamkan berbagai kompetensi yang diperlukan untuk berperan di tengah lingkungan neoliberal, meliputi sifat mudah beradaptasi, fleksibilitas, inisiatif, dan kreativitas. Reformasi neoliberal dalam pendidikan menelorkan sejumlah kebijakan, praktek, dan model pendidikan yang membentuk dinamika kehidupan pendidikan sekolah. Beberapa kebijakan neoliberal yang diterapkan dalam pendidikan sekolah di banyak negara adalah (Vassallo, 2012):
- a. Penguatamaan pelaksanaan *high-stakes standardized testing* untuk mengukur keberhasilan pendidikan, sebagaimana diwujudkan dalam bentuk UN di Tanah Air.

- b. Penerapan *social efficiency model of education*. Masyarakat memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sehingga sekolah wajib menyiapkan lulusan dengan pengetahuan, ketrampilan, dan disposisi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.
 - c. Dalam rangka menghomogenisasi pendidikan lewat penciptaan aneka standar nasional, murid dihadapkan pada jenis kurikulum baik eksplisit maupun tersembunyi, yang bertujuan menyiapkan mereka mengisi berbagai peran sesuai latar belakang kelas sosial mereka. Sekolah yang melayani murid dari kelas pekerja fokus menanamkan kepatuhan, insentif uang, dan kemampuan ingatan. Sekolah yang melayani murid dari kelas menengah dan atas fokus menyiapkan mereka menjadi calon manajer dengan menanamkan ketrampilan memecahkan masalah dan kreativitas (Vassallo, 2012).
6. Pedagogi kritis merupakan sebuah “big tent” atau rumah besar yang menaungi berbagai versi pandangan dan praktek pendidikan yang mengklaim bersemangat kritis (McArthur, 2010). Namun pada berbagai gerakan pendidikan kritis tersebut terdapat kesamaan dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. **Kesamaan ciri.** Semua gerakan pendidikan kritis bercirikan:
 - 1) Memandang *learning* atau pembelajaran sebagai tindakan politis dengan tujuan-tujuan yang bersifat politis pula, seperti semua bentuk interaksi sosial lainnya. Tujuan akhir pendidikan kritis adalah terjadinya perubahan-perubahan sosial di tengah masyarakat ke arah terciptanya keadilan sosial.
 - 2) Memiliki intensi untuk menguatkan ruang-ruang publik di mana pembelajaran di sekolah maupun di perguruan tinggi tidak dipisahkan secara artifisial dari kehidupan masyarakat, sebaliknya justru harus terlibat atau melibatkan diri dengan kehidupan masyarakat luas melalui sebuah dialektika yang bersifat kreatif dan transformatif. Pembagian pengetahuan ke dalam berbagai disiplin ilmu tak bisa dilepaskan dari kepentingan kelompok-kelompok elit dalam masyarakat untuk melestarikan bentuk-bentuk pengetahuan dan wacana eksklusif yang menguntungkan bagi mereka sendiri. Sekolah dan perguruan tinggi wajib meninggalkan sekat-sekat disiplin dan sebagai gantinya menciptakan ruang-ruang yang bersifat interdisipliner atau transdisipliner (Giroux, 1992).
 - b. **Kesamaan agenda.** Semua gerakan pendidikan kritis memperjuangkan agenda berikut (Cho, 2007):
 - 1) Penyadaran tentang fungsi ideologis dari pengetahuan yang diajarkan di sekolah. Pandangan *mainstream* tradisional tentang kurikulum menyatakan bahwa pengetahuan bersifat objektif, netral, dan terbebas. Tugas sekolah adalah menemukan cara terbaik untuk mengalihkan pengetahuan dan ketrampilan yang sudah dirancang di dalam kurikulum kepada murid. Sebaliknya, pendidikan kritis berpandangan bahwa pengetahuan adalah kekuasaan. Maka, setiap kurikulum harus dikritisi di seputar tiga hal: (a) pengetahuan siapa?; (b) pengetahuan seperti itu menguntungkan bagi siapa?; dan (c) siapa yang dikorbankan oleh pengetahuan seperti itu? Tentang kurikulum sekolah, pendidikan kritis mengembangkan sejumlah konsep baru yang bersifat kritis: (a) *hidden curriculum* atau kurikulum tersembunyi merupakan sebuah apparatus yang efektif untuk mengindoktrinasi murid melalui rutinitas dan norma tak tertulis yang mengatur kehidupan dan praktek sehari-hari di sekolah; (b) *habitus* dan *modal kultural* merupakan mekanisme melalui mana hirarki kelas dalam masyarakat diproduksi dan direproduksi lewat sistem pengetahuan yang diajarkan di sekolah; (c) ideologi-ideologi hegemonik dalam masyarakat ditanamkan di dalam dan melalui (kurikulum) sekolah. Maka pertarungan pun terjadi antara kelompok Kanan dan

- kelompok Kiri tentang pengetahuan yang mana dan pengetahuan siapa yang harus dijadikan kurikulum resmi di sekolah-sekolah. Pendidikan kritis bertujuan menciptakan bentuk-bentuk pengetahuan alternatif atau bentuk-bentuk pengetahuan yang kontra-hegemonik (Cho, 2007).
- 2) Mendemokratisasikan pedagogi, dalam arti menciptakan kultur emansipatoris dalam persekolahan (Cho, 2007). Pendidikan kritis berusaha menciptakan tata laksana pedagogis serta kultur sekolah yang lebih demokratis demi memberdayakan murid. Berbagai kondisi dan praktek di dalam kelas yang terkait dengan proses-proses hegemonik yang bertujuan melestarikan marginalisasi kelompok-kelompok ter subordinasi secara ekonomis dan kultural, digantikan dengan misalnya sebuah pedagogi yang bercorak “problem posing” demi menciptakan pendidikan yang lebih demokratis dan membebaskan sebagaimana digagas oleh Freire (1970).
- c. **Kesamaan proyek.** Demi merealisasikan agenda pendidikan yang memerdekakan, semua gerakan pendidikan kritis melaksanakan tiga proyek berikut ini (Cho, 2007):
- 1) *Proyek pengalaman.* Pendidikan kritis pada dasarnya mengandalkan atau mengutamakan pengalaman dalam belajar sebagai tandingan terhadap klaim-klaim kebenaran yang bersifat hegemonik. *Pedagogi pengalaman* yang ditawarkan oleh pendidikan kritis bertujuan “membebaskan murid dari aneka kerangka atau pola budaya dalam membentuk pengetahuan yang bersifat opresif dengan cara memberikan kepada murid cara-cara baru untuk memberikan tempat yang sah bagi pengalaman mereka sendiri sebagai sumber pengetahuan”. Memberikan tempat terhormat bagi pengalaman sendiri sebagai sumber pengetahuan dipandang sebagai proses kritik ideologi sekaligus sebagai jalan untuk menemukan alternatif-alternatif.
 - 2) *Proyek anti-sistem.* Sejalan dengan pengutamaannya pada pengalaman atau politik sehari-hari, pendidikan kritis juga menerapkan pendekatan anti struktur atau anti sistem dalam rangka menciptakan ruang kelas dan kultur sekolah yang demokratis, khususnya melalui penerapan pedagogi yang bercorak anti-hirarkis, bentuk otoritas yang non-hirarkis, dan demokrasi yang partisipatorik. Mengikuti Foucault (1980) yang memandang kekuasaan sebagai teknologi dan mekanisme yang tersebar di mana-mana, maka pendidikan kritis lebih mengandalkan gerakan-gerakan demokrasi akar rumput lokal dari bawah dalam rangka mengusahakan perubahan-perubahan sistemik dalam tata kehidupan masyarakat. Bagi pendidikan kritis, usaha yang bersifat individual dan lokal menjadi tempat atau wahana perjuangan utama bagi terjadinya perubahan sosial, dan bukan melalui perubahan sistematis seperti revolusi sosial (Cho, 2007).
 - 3) *Proyek inklusi.* Semua gerakan pendidikan kritis bertujuan melakukan reformasi pendidikan maupun institusi-institusi sosial lainnya ke arah menjadikannya semakin inklusif berdasarkan berbagai prinsip keutamaan seperti keadilan, kesamaan hak, anti-diskriminasi, demokrasi, emansipasi, kebaikan bersama, kebebasan individu, pengakuan, perdamaian, dan keadilan sosial. Untuk membedakannya dengan konsep inklusi ala liberalisme dan multikulturalisme kanan, pendidikan kritis cenderung menggunakan istilah-istilah “border-crossings”, “between-borders”, “border-less”, “border-lands”, atau “border-ness” dalam memperbincangkan inklusi.
- d. **Kesamaan politik.** Semua gerakan pendidikan kritis menjalankan tiga macam politik dalam rangka melaksanakan agenda-agenda dan proyek-proyeknya (Cho, 2007):

- 1) *Politik kulturalis*. Pendidikan kritis lebih fokus untuk berjuang di tataran kultur atau suprastruktur (meliputi pengetahuan, bahasa, representasi, wacana, dan ideologi) ketimbang di tataran basis (ekonomi) atau infrastruktur (institusi sosial).
 - 2) *Politik diri/identitas*. Pendidikan kritis lebih fokus mengolah agensi/subjek/self ketimbang memperjuangkan perubahan-perubahan sistematis atau institusional. Bentuk-bentuk resistensi kecil dan sehari-hari dipandang dan dirayakan sebagai sumber perlawanan yang diyakini mampu mengarah pada terjadinya transformasi sistem.
 - 3) *Politik akar rumput*. Semua gerakan pendidikan kritis menekankan pentingnya demokrasi akar rumput dan bentuk otoritas yang non-hirarkis atau partisipatorik. Dialog dan consensus dipandang sebagai satu-satunya bentuk pengambilan keputusan yang sah dan bisa diterima. Seperti pada politik New Left, politik pendidikan kritis mengutamakan realisasi-diri dan ekspresi-diri sebagai tujuan dari gerakan sosial baru yang mengandalkan bentuk-bentuk organisasi maupun taktik yang bercorak terdesentralisasi, non-hirarkis, dan tersebar (Cho, 2007).
7. **Integrasi kurikulum.** Salah satu upaya pendidikan kritis melakukan *counter hegemony* terhadap pendidikan arus utama yang dikendalikan oleh ideologi neoliberal adalah penerapan *integrasi kurikulum* dalam pendidikan sekolah. Integrasi kurikulum dilandasi oleh pandangan bahwa yang harus dijadikan sumber kurikulum adalah berbagai masalah, isu, dan keprihatinan yang muncul dalam kehidupan. Beane (1995) mengklasifikasikan problem-problem kehidupan yang dimaksud ke dalam dua kelompok: (a) problem-problem yang terkait dengan kehidupan diri atau pribadi; dan (b) problem-problem yang terkait dengan kehidupan dalam lingkungan yang lebih luas. Dengan kata lain, fokus integrasi kurikulum adalah membantu murid menemukan makna pribadi dan makna sosial. Maka, tujuan penerapan integrasi kurikulum adalah: (a) mendorong murid mengintegrasikan pengalaman belajar ke dalam skema makna mereka dalam rangka memperluas dan memperdalam pemahaman mereka tentang diri dan dunia sekeliling mereka; dan (b) mendorong murid terlibat dalam mencari, menemukan, dan menerapkan pengetahuan mereka secara organik bukan secara artifisial (Beane, 1995). Dengan kata lain, pengetahuan dicari dan dirumuskan dalam konteks memecahkan masalah atau mengatasi isu dan keprihatinan yang dihadapi secara nyata. Konteks semacam itu menuntut penerapan pengetahuan dengan cara-cara yang terintegrasi, sebab kehidupan sendiri tidak mengenal pembatasan atau kompartementalisasi pengetahuan yang lazim kita kenal sebagai pembagian disiplin pengetahuan (Beane, 1995). Bagaimana mengembangkan pengetahuan dalam kurikulum yang terintegrasi?
- a. Integrasi kurikulum dimulai dengan mengidentifikasi tema-tema atau pusat-pusat sebagai dasar untuk mengorganisasikan pengalaman belajar. Tema-tema ini harus diambil dari keprihatinan nyata, seperti konflik antara warga, hidup berwawasan masa depan, kebudayaan dan identitas, lingkungan kita, dan sebagainya.
 - b. Jadwal belajar disusun berdasarkan proyek dan aktivitas belajar, bukan berdasarkan mata pelajaran.
- Apa saja implikasi dari penerapan integrasi kurikulum dalam pengajaran di sekolah? Menurut Bean (1995), ada beberapa implikasi sebagai berikut:
- a. Integrasi kurikulum berdampak mengubah sekuensi bidang studi atau mata pelajaran. Pengetahuan diberikan karena dibutuhkan, bukan karena diurutkan. Dengan kata lain, sekuensi bidang studi atau mata pelajaran tidak lagi bersifat mutlak.
 - b. Tidak semua informasi dan ketrampilan yang selama ini disajikan dalam kurikulum berbasis bidang studi muncul dalam kurikulum terintegrasi. Menurut Bean (1995), hal ini tidak perlu dirisaukan sebab dalam kurikulum berbasis bidang studi diajarkan banyak *trivia* atau hal-hal yang kurang penting yang baru sungguh-sungguh

diperlukan dan bermakna jika seseorang menjadi spesialis dalam disiplin pengetahuan yang bersangkutan. Integrasi kurikulum memaksa kita menggunakan hanya konsep-konsep yang paling penting dan paling bermanfaat dari setiap disiplin pengetahuan, konsep-konsep yang paling bermakna terbukti karena konsep-konsep semacam itu akan muncul dengan sendirinya dalam kehidupan nyata.

- c. Integrasi kurikulum memang bisa memporandakan disiplin pengetahuan, yaitu pengetahuan dari kelompok budaya dominan.
- d. Di pihak lain, integrasi kurikulum hanya akan berhasil jika guru sebagai pelaksana kurikulum pertama-tama sudah memiliki pendasaran yang kuat dalam masing-masing bidang studi.

Dapat disimpulkan bahwa integrasi kurikulum berpusat pada kurikulum kehidupan itu sendiri, bukan pada penguasaan informasi sepotong-sepotong dalam sekat-sekat bidang studi. Integrasi kurikulum berakar pada pandangan bahwa belajar merupakan integrasi yang berkelanjutan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru dengan tujuan memperdalam dan memperluas pemahaman kita tentang diri sendiri maupun tentang dunia di sekeliling kita. Integrasi kurikulum berfokus pada kehidupan sebagaimana kita hayati kini, bukan sebagai persiapan untuk hidup di masa mendatang atau persiapan belajar di jenjang yang lebih tinggi. Integrasi kurikulum diabdikan bagi kebutuhan nyata murid, bukan bagi ambisi spesialisasi orang dewasa. Integrasi kurikulum bertujuan membantu murid mengonstruksi makna secara aktif, bukan secara pasif mengasimilasi makna yang berasal dari orang lain (Beane, 1995).

Daftar Acuan

Beane, J.A. (1995). Curriculum integration and the discipline of knowledge. *The Phi Delta Kappan*, 76(8), 616-622.

Breunig, M. (2005). Turning experiential education and critical pedagogy theory into praxis. *Journal of Experiential Education*, 28(2), 106-122.

Cho, S. (2010). Politics of critical pedagogy and new social movement. *Educational Philosophy and Theory*, 42(3), 310-325.

Contemporary developers of critical pedagogy (tanpa tahun).

McArthur, J. (2010). Time to look anew: Critical pedagogy and disciplines within higher education. *Studies in Higher Education*, 35(3), 301-315.

Murphy, P. (1996). Defining pedagogy. Dalam P.F. Murphy & C.V. Gipps (Eds.), *Equity in the classroom: Towards effective pedagogy for girls and boys*. UNESCO.

Vassallo, S. (2012). Critical pedagogy and neoliberalism: Concerns with teaching self-regulated learning. *Studies of Philosophy of Education*.

Disampaikan dalam *Urun Rembug Nasional* yang diselenggarakan oleh *Jogja Creative Society* tanggal 19 Maret 2016 di Hotel Sahid Yogyakarta.